



## BUPATI PURBALINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 2000

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA  
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penyuluhan pertanian di Kabupaten Purbalingga, maka perlu membentuk dan mengatur Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian :

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a, maka pembentukan dan pengaturan Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah :

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 8) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1996 Seri D Nomor 4) ;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 8 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 4) :
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 9 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga (Lembaran Daerah Tahun 1999 Seri D Nomor 11) :

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN.

## PAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga.
- d. Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga yang selanjutnya disingkat BIPP.
- e. Kepala Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian adalah Pemimpin Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala BIPP.
- f. Balai Penyuluhan Pertanian adalah Balai Penyuluhan Pertanian yang kedudukannya di Tingkat Kecamatan selanjutnya disingkat BPP.
- g. Penyuluhan Pertanian adalah sistem pendidikan luar sekolah di bidang pertanian untuk petani-nelayan dan keluarganya serta anggota masyarakat pertanian agar dinamika dan kemampuannya dalam memperbaiki kehidupan dan penghidupannya dengan kekuatan sendiri dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peranan dan peran sertanya dalam pembangunan pertanian.
- h. Penyuluh Pertanian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian secara penuh oleh Pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian.

RAB I  
PEMRENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk BIPP.

RAB III  
KELOMPOKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Kedudukan

Pasal 3

- (1) BIPP adalah lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BIPP dipimpin oleh seorang Kepala dengan Jabatan Fungsional Penvuluh Pertanian.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok

Pasal 4

BIPP mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan informasi dan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga  
Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, BIPP mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program penyuluhan pertanian ;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja penyuluhan pertanian;
- c. penediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian;
- d. pembinaan pengelolaan BPP;
- e. koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian tingkat Kecamatan;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pengelolaan sentra komunikasi pembanguan pertanian di Kabupaten;
- h. pelatihan-kursus bagi penyuluh pertanian dan petani-nelayan;
- i. penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani-nelayan;
- j. bimbingan penggunaan sarana usaha petani-nelayan;
- k. percontohan pertanian;
- l. pengelolaan perustakaan;
- m. pengkajian penerapan Teknologi Pertanian bersama dengan Dinas terkait;
- n. pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan penyuluhan;
- o. pelayanan urusan ketatausahaan.

## RAB IV SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Pertama Organisasi

#### Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi BIPP terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Petugas Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
  - d. BPP.
- (2) Ragan Struktur Organisasi BIPP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

#### Kepala BIPP

#### Pasal 7

Kepala BIPP mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan BPP dalam melaksanakan pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

#### Petugas Tata Usaha

#### Pasal 8

Petugas Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, surat menyurat, kerumahtanggaan dan perlengkapan.

#### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan BIPP sesuai dengan bidang keahlian masing-masing.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, terdiri dari sejumlah tenaga penyuluh pertanian dan jabatan fungsional lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lainnya, dikoordinasikan oleh pemangku jabatan fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BIPP.
- (3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Jabatan Fungsional lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



## Ralai Penyuluhan Pertanian

### Pasal 11.

- (1) RPP adalah merupakan instalasi dan sekaligus Bagian dari institusi BIPP dalam menyelenggarakan penyuluhan pertanian di Kecamatan.
- (2) Di setiap BPP ditempatkan sekelompok penyuluh pertanian yang dikordinasikan oleh seorang penyuluh pertanian yang senior.

## BAB V TATAKERJA

### Bagian Pertama Umum

#### Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok BIPP merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksana fungsi BIPP sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pelayanan informasi dan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh BPP dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing.
- (3) Pengaturan aspek ketatalaksanaan BIPP yang meliputi Prosedur Operasional Standar (POS), hubungan kerja, tata cara kerja dan pedoman kerja, ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pelaporan

#### Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh BIPP dan BPP dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan, dan tindak lanjut pelaksanaan penyuluhan pertanian.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Kepala BIPP ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat lainnya di lingkungan BIPP ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VII PEMBIAYAAN

#### Pasal 15

Biaya penyelenggaraan BIPP dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten, serta sumber lain yang sah.

BAR VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAR IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Disahkan di Purbalingga  
pada tanggal 25 April 2000



TRILYONO BUDI SASONGKO

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2000  
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
BALAI INFORMASI DAN PENYULUHAN PERTANIAN

I. PENJELASAN UMUM

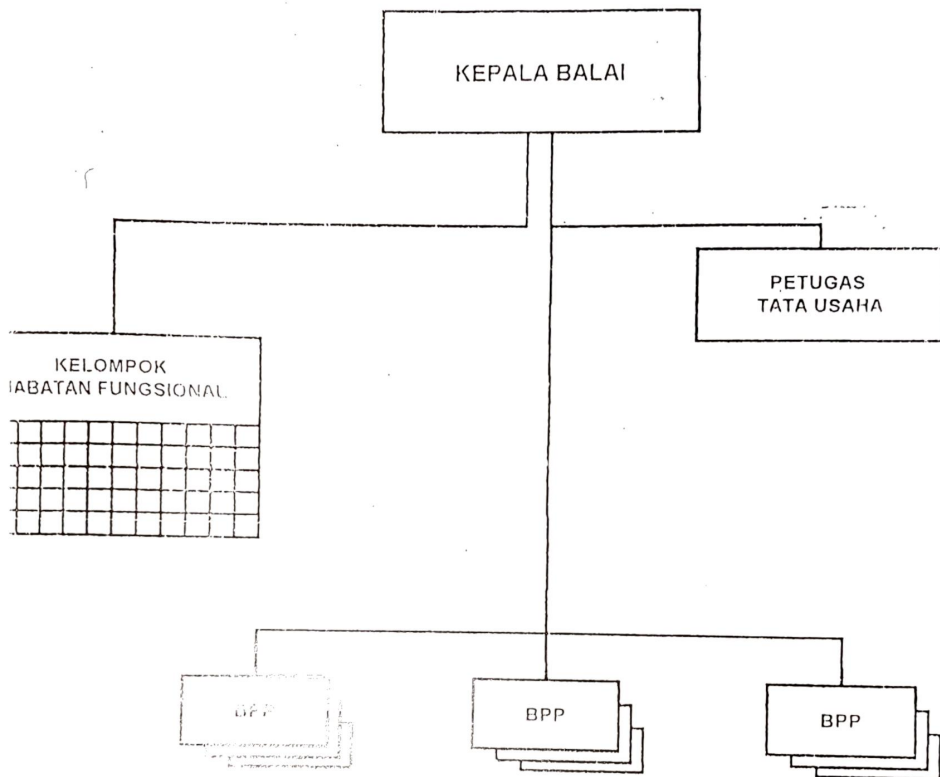
Dengan semakin meningkatnya informasi dan perkembangan penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian untuk menunjang keberhasilan peningkatan / pemantapan ketahanan pangan dan pelaksanaan program pembangunan pertanian dengan menggerakkan semua potensi aparat Penyuluh Pertanian. Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka lebih meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna serta untuk tercapainya efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II perlu dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Balai Informasi dan Penyuluhan Pertanian Kabupaten Purbalingga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 huruf a s/d f : cukup jelas.  
Pasal 1 huruf g : Yang dimaksud dengan Petani-nelayan adalah Pengelola usaha tani dan/atau usaha penangkapan ikan yang meliputi petani, pekebun, peternak dan nelayan.  
Pasal 1 huruf h s/d o : cukup jelas.  
Pasal 2 s/d Pasal 18 : cukup jelas.

GAN SUSUNAN ORGANISASI  
LAI INFORMASI DAN PENYULUHAN  
RTANIAN KABUPATEN PURBALINGGA

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KAB. PURBALINGGA  
NOMOR 3 TAHUN 2009  
TENTANG PEMENDUKAN ORGANISASI  
DAN TATAKERJA BALAI INFORMASI  
DAN PENYULUHAN PERTANIAN



BUPATI PURBALINGGA

TRI YONO BUDA SASONGKO